

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAHAN EFEKTIF
GUNA MENCAPAI PEMERINTAH YANG BERKELANJUTAN**

Abdul Rohman¹, Yuliansyah M. Diah², Burhanudin³

¹Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, abdulrohman@fe.unsri.ac.id

²Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, yuliansyahmdiah@fe.unsri.ac.id

³Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, burhanudin_akt78@yahoo.co.id

DOI: <https://doi.org/10.35449/jemasi.v20i2.838>

ABSTRAK

Pemerintah yang efektif akan dapat menghadapi situasi *volatile* saat ini dan pada masa yang akan datang. Pemerintah yang efektif memiliki berbagai faktor pendukungnya. Faktor-faktor yang mendukung pemerintah yang efektif antara lain adalah kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintah. Tata kelola pemerintah yang diterapkan di Indonesia meliputi tahapan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, penyusunan anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk melihat apakah tata kelola pemerintah Indonesia sudah efektif atau belum maka kualitas tatakelola tiap tahap harus diuji. Hal ini penting karena belum ada penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan terkait dengan tahap pengelolaan pemerintah. Pengujian menggunakan populasi pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Pemerintah Provinsi di Indonesia sampai dengan tahun 2023 terdiri dari 38 provinsi. Pemerintah Kabupaten di Indonesia terdiri dari 416 pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota berjumlah 98 pemerintah kota. Penelitian ini menggunakan sample jenuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berjenis data sekunder. Data sekunder yang digunakan berasal dari Berbagai kementerian. Data yang digunakan meliputi data laporan keuangan, data laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, data Indeks daya saing Daerah dan data APBD. dan data lain yang diperlukan. Penelitian yang menguji hubungan antara faktor tatakelola pemerintahan pada tiap tahapan dengan efektivitas pemerintah belum diteliti di Indonesia. Dengan rencana penelitian ini, peneliti berharap dapat melaksanakan pengujian faktor-faktor tersebut. Hal ini penting karena adanya berbagai situasi yang saat ini terjadi guna pemerintah dapat menghadapinya dengan baik dan mampu menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Efektif; Perencanaan; Anggaran; Pelaksanaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban

PENDAHULUAN

Perkembangan global terkait dengan layanan publik pemerintah salahsatunya ditandai dengan lahirnya pendekatan baru yaitu New Public Management (NPM). Praktik New Public Management muncul pertama kali di Negara Inggris. Gerakan ini muncul di negara Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Margaret Thatcher. Perdana Menteri Margaret Thatcher memainkan peran fungsional. Peran fungsional yang dimaksud yaitu sebagai “*policy entrepreneur*” dan peran resmi perdana menteri. Margaret Thatcher melakukan upaya untuk perubahan dalam kebijakan manajemen publik di berbagai bidang. Bidang-bidang yang didorong untuk dilakukan perubahan antara lain seperti metode organisasi, pelayanan sipil, hubungan perburuhan, perencanaan pengeluaran, manajemen keuangan, audit, evaluasi, dan pengadaan. Generasi Penerus Margaret Thatcher adalah John Major. John Major memasukkan berbagai kebijakan manajemen publik pada agenda pemerintahan Konservatif. Agenda ini mengarah pada penerapan Inisiatif Langkah Berikutnya. Major juga meluncurkan program Citizens Charter Initiative, Competing for Quality, Resource Accounting and Budgeting, dan Private Finance Initiative.

Perkembangan global dengan lahirnya NPM mendorong Pemerintah Indonesias untuk melakukan adopsi dan harmonisasi pada berbagai bidang layanan publik. Untuk melakukan adopsi dan harmonisasi berbagai perubahan dalam layanan publik maka pemerintah Indonesia menyusun berbagai regulasi sebagai payung hukumnya. Regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan telah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Regulasi mengenai pengelolaan keuangan banyak mengalami perubahan, baik ditingkat undang-undang sampai dengan tingkat peraturan menteri.

Pemerintah daerah juga menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai akibat mandatori dari peraturan perundangan yang baru. Regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah antara lain mencakup perubahan pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban. Banyaknya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah harus disikapi dengan baik oleh setiap entitas pemerintah dan pemerintah daerah. Aspek yang terdampak meliputi berbagai ruang lingkup pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai sosialisasi dan pelatihan guna mempersiapkan pola pengelolaan keuangan yang baru pada masing-masing instansinya.

Perkembangan implementasi New Public Management tidak dibarengi dengan keberlangsungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Fenomena ini tampak dari berbagai kondisi yang dialami oleh pemerintah dan pemerintah daerah baik global maupun nasional. Pemerintah Yunani terlilit utang Rp 3.500 triliun dari tahun 2004 hingga tahun 2015 sehingga kesulitan dalam pembayaran kembali hutang tersebut. Sejumlah negara berada di tepi jurang kebangkrutan. Bahkan, ada yang sudah dinyatakan bangkrut. Krisis ekonomi yang berkepanjangan sebagai dampak dari perang yang melambungkan harga komoditas global turut menjadi biang kerok utama sulitnya negara-negara tersebut untuk bangkit. Negara-negara yang sudah dan nyaris bangkrut sampai dengan awal tahun 2023 yaitu Sri Lanka, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Mesir (LUC, 2024). Bahkan Pemerintah atau negara maju seperti pemerintah Amerika juga mengalami *US Government Shutdown*. Data terkait defisit anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Amerika dan Yunani dari tahun ke tahun tampak pada tabel berikut:

Selain itu, hampir separuh (50%) negara di benua Eropa, 40% negara di Afrika, dan 30% negara di Asia menyatakan bangkrut selama dua abad sebelumnya (Mustaqim, 2024). Ekuador paling sering menyatakan dirinya bangkrut di antara negara-negara berdaulat dan telah menyatakan bangkrut sebanyak 10 kali. Brazil, Meksiko, Uruguay, Chile, Kosta Rika, Spanyol dan Rusia telah menyatakan kebangkrutan sebanyak sembilan kali dalam periode yang sama. Jerman telah mengalami kebangkrutan sebanyak 8 kali dalam dua setengah tahun, sehingga menjadi negara ekonomi utama yang mengalami kebangkrutan terdepan, diikuti oleh Amerika Serikat sebanyak 5 kali, China dan Inggris sebanyak 4 kali, serta Jepang sebanyak dua kali. Di era modern, Rusia menyatakan bangkrut pada akhir tahun sembilan puluhan, dan pada tahun 2001, Argentina juga menyatakan bangkrut.

Tabel 1. Defisit Keuangan Negara

Negara	Kondisi	Tahun	Nilai
1. USA	Defisit	1980	\$700,000
	Defisit	1981	\$80–90 million
	Defisit	1984	\$65 million
	Defisit	1986	\$62.2 million
	Defisit	1990	\$2.57 million
	Defisit	Nov-95	\$400 million
	Defisit	1995–1996	\$400 million
	Defisit	2013	\$2.1 billion
	Defisit	Jan-18	\$5 billion
	Defisit	2018–19	\$5 billion
2. Yunani	Defisit	2004 - 2015	240 Milliar Euro (Rp 3.500 Triliun)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Fenomena diatas juga terjadi di secara nasional di lingkungan Pemerintah Indonesia. Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota tidak luput dari defisit anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari berbagai pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten dan kota mengalami defisit yang bervriasi. Berikut sebagian data Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mengalami defist anggaran untuk periode tahun anggaran tahun 2023.

Tabel 2. Defisit Pemerintah Daerah

No	Negara	Kondisi	Tahun	Nilai
1	Provinsi Kepri	Defisit	2023	132,2 Milliar
2	Provinsi Sulsel	Defisit	2023	600 Milliar
3	Provinsi Maluku	Defisit	2023	14,607 milyar
4	Provinsi Sumbar	Defisit	2023	350 Milliar
5	Provinsi Jambi	Defisit	2023	Rp499 miliar
6	Kota Depok	Defisit	2023	435,4 miliar
7	Kab. Cilacap	Defisit	2023	22.31 Milliar

Sumber: Olah Data dari Berbagai Sumber

Perencanaan anggaran atau keuangan sangat penting dalam kinerja sektor publik dan swasta. Perencanaan anggaran tidak hanya berlaku di negara-negara maju, namun juga di negara-negara berkembang. Penelitian di Pemerintah Tanzania menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif secara statistik antara perencanaan anggaran (keuangan) dan kinerja sektor publik di Tanzania (Chindengwike J. D., 2023).

Penyusunan anggaran (Budgeting) dan pelaksanaan anggaran memiliki kontribusi utama bagi pemerintah yang ditunjukkan dari evaluasi kategori anggaran dan tahapan, prosedur, keberlanjutan dan kredibilitas serta pengesahan dan pelaksanaan anggaran (Giuberti, 2015). Hal ini menunjukkan pentingnya tahap penyusunan dan tahap pelaksanaan anggaran bagi pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah.

Pemerintah harus menyusun pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang direncanakan dan disusun. Pemerintahan terbuka (Open/Effective Government) memiliki hubungan antara keterbukaan informasi publik (pelaporan Akuntansi) dan partisipasi warga negara yang kuat (Porumbescu, Cucciniello, & Gil-Garcia, 2019).

KAJIAN PUSTAKA

New Public Management (NPM)

New Public Management merupakan manajemen publik baru, sebagai langkah menuju pendekatan pemerintahan yang menempatkan penekanan pada transparansi, manajemen kinerja dan akuntabilitas pegawai dan manajer sektor public (Heyer, 2011). NPM merupakan gerakan administrasi publik baru yang lahir untuk bergerak melampaui administrasi tradisional masyarakat (Bryson & Bloomberg, 2014).

Pengelolaan kinerja pada lingkungan pemerintah atau sektor publik yang efektif pada umumnya menjadi salah satu pilar utama paradigma “New Public Management” (NPM). Kinerja Manajemen merupakan “suatu sistem yang menghasilkan informasi kinerja melalui perencanaan strategis dan pengukuran kinerja periodik dan yang menghubungkan informasi yang dihasilkan pada para pengambilan keputusan. Keputusan ini tentunya akan mempengaruhi serangkaian kemungkinan keputusan pada pemegang atau pengambil keputusan” (Moynihan, 2008).

Pengukuran kinerja manajemen Pemerintah yang Efektif memerlukan pengukuran, penggabungan atau konsolidasi, dan penggunaan data kinerja (Van Dooren, 2015)). Organisasi sektor publik di negara maju dunia telah menggunakan sistem manajemen kinerja setidaknya sejak tahun 1990an (Williams, 2003).

Teori Pemerintah Yang Efektif atau Terbuka (Effective / Open Government)

Pemerintahan yang efektif atau terbuka merupakan pemerintahan yang secara efisien dan bertanggung jawab memenuhi peran dan tanggung jawabnya untuk melayani kepentingan terbaik bagi warganya. Manajemen kinerja pemerintah daerah yang efektif sangat penting untuk memberikan layanan yang efisien kepada warga. Hal ini terutama berlaku untuk negara-negara berkembang di mana manajemen kinerja publik sektor ini sangat kurang.

Pemerintah yang efektif perlu memastikan efektivitas sistem manajemen kinerja. Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah dapat mempertahankan fokusnya pada pengelolaan kinerja dibandingkan dengan usaha pengukuran kinerjanya (Radnor, 2004). Penggunaan data kinerja harus selalu menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, sistem ini dibangun sedemikian rupa

sehingga mengikat kinerja secara efektif pelaporan ke dalam kerangka pengambilan keputusan dan implementasi. Sistemnya sepenuhnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan online. Konsep efektivitas pemerintah menurut Bank Dunia (Kaufmann, 2007), mengukur kualitas perumusan kebijakan dan layanan publik. Semenatra itu Ashis Adhikary dalam penelitian tahun 2023 menyatakan pemerintah yang efektif adalah yang mampu mengelola dengan baik aspek sosial-ekonomi (Adhikary, 2023).

Perencanaan Anggaran (Budget Development)

Perencanaan anggaran merupakan sistem perencanaan program pembangunan pemerintah untuk masa depan atau jangka panjang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang dimkasud dengan perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah (Permendagri, 2018).

Dalam praktiknya perencanaan anggaran ini digunakan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan jangka panjang. Dokumen tersebut antara lain RPJP/D, RPJM/D dan RKP/D. Dokumen ini berjenjang dari sisi jangkauan waktunya. RPJP/D memiliki jangk waktu 20 tahun ke depan. RPJM/D memiliki jangkauan waktu 5 tahun dan RKP/D memiliki jangkauan waktu satu tahun. Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data SIPD mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Proses perencanaan anggaran sangat penting bagi pemerintah atau sektor publik pada umumnya. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi jalannya operasional pemerintah dalam periode anggaran yang disusun. Proses perencanaan keuangan atau anggaran sangat penting dalam kinerja sektor publik dan swasta], tidak hanya, berlaku di negara-negara maju, namun di negara-negara berkembang (Chindengwike & Daniel, March 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya fungsi perencanaan anggaran di sektor publik khususnya pemerintahan agar pemerintah yang efektif dapat melayani atau menjalankan fungsi layanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

a. Penyusunan Anggaran (Budgeting)

Penganggaran merupakan instrumen manajemen yang layak harus digunakan untuk mengarahkan rencana organisasi dan Prosedur (Xolile Mkuhlana, 2022). Anggaran adalah alat strategis yang tidak dapat dihindari untuk digunakan perencanaan penyediaan layanan efektif suatu organisasi atau barang. Mereka berfungsi sebagai representasi keuangan dari pekerjaan, jasa, atau barang yang akan dihasilkan atau diserahkan oleh suatu entitas.

Penyusunan anggaran merupakan tahap untuk menyusun *budget operational*. Pada tahap ini disusunlah dokumen anggaran berupa Rencana anggaran yang meliputi waktu satu tahun (single years) dan beberap tahun untuk yang multi years. Dokumen yang disusun melalui rencana kerja dan anggaran (RKA) dikompilasi menjadi ancagan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah/Desa. Selanjutnya dibahas bersama DPR/D untuk mendapatkan persetujuan. Jika disetujui maka rancangan APBD (RAPBD) berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Hasil penelitian Momi Dahan tahun 2019 menunjukkan bahwa negara-negara yang kurang tersentralisasi menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik di bidang kesehatan dan infrastruktur dan efektivitas serupa dalam pengumpulan pajak. Hubungan negatif antara anggaran sentralisasi dan efektivitas pemerintah tampaknya mulai terlihat, terutama pada tahap pelaksanaan proses penganggaran, namun tidak signifikan pada tahap perumusan dan legislasi. Hasil ini tetap ada dalam daftar dari tes sensitivitas (Dahan, 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya penyusunan anggaran yang baik guna menunjang efektivitas pemerintah.

b. Pelaksanaan Anggaran (Budget Execution)

Tahap pelaksanaan merupakan tahap dimana pemerintah daerah melaksanakan anggaran yang telah dibahas dengan DPR/D. Dengan telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, maka langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang. DPA-SKPD yang dijadikan sebagai dokumen pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terlebih dahulu disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Setelah DPA Selesai dan maka tahap berikutnya adalah pengajuan anggaran belanja dan penarikan pajak dan retribusi dari sisi pendapatan. Pendapatan ditarik dari wajib pajak dan retribusi dari masyarakat umum. OPD yang berwenang saja yang dapat melaksanakan pemungutan pendapatan daerah. Sementara itu belanja dapat diajukan oleh seluruh OPD kepada Dinas pengelola keuangan dan aset daerah melalui Bendahara umum Daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah. Dokumen transaksi baik dari pendapatan maupun belanja akan dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan mekanisme akuntansi. Pelaksanaan anggaran merupakan upaya untuk memperoleh pendapatan secara optimal dan belanja.

Beberapa ukuran kualitas pelaksanaan anggaran, berdasarkan penyimpangan dari target anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui. Ada beberapa cara untuk mengukur deviasi komposisional dalam pelaksanaan belanja (Addison, 2013). Itu yang pertama adalah ukuran keseluruhan kualitas pelaksanaan anggaran. Ini terfokus pada rata-rata persentase penyimpangan dalam anggaran. Yang kedua difokuskan pada persen deviasi di dalamnyabagian anggaran yang dibelanjakan secara berlebihan, dibelanjakan terlalu sedikit, dan dibelanjakan secara akurat. Yang ketiga adalah ukuran jumlah kepala anggaran yang membelanjakannya secara berlebihan, yang kurang membelanjakannya, dan yang membelanjakannya secara akurat. Yang keempat adalah ukuran rata-rata kedalaman kelebihan atau kekurangan pembelanjaan dalam setiap kelompok kepala anggaran.

Dia ditemukan bahwa sangat sedikit negara yang mampu melaksanakan anggarannya dengan baik, apa pun kondisinya apakah mereka memprioritaskan stabilitas makroekonomi atau penyediaan layanan publik. Ada kesalahan yang meluas dalam meramalkan pendapatan dan pembiayaan counter-cyclical dalam satu tahun tidak sepenuhnya terjadi mengkompensasi

penyimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penyimpangan pengeluaran cenderung positif berkorelasi dengan penyimpangan pendapatan. Dalam kecenderungan yang luas ini, terdapat banyak variasi dalam hal ini perilaku tidak hanya antar negara tetapi juga di dalam negara dari waktu ke waktu. Akurasi komposisi adalah langka. Adalah umum untuk melihat kelebihan dan kekurangan pembelanjaan terjadi secara bersamaan, bahkan ketika pembelanjaan bersih penyimpangan sumber daya kecil.

c. Pelaporan (Reporting)

Pelaporan merupakan tahap untuk menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dengan mekanisme akuntansi. Akuntansi merupakan sistem yang bertugas mencatat transaksi, meringkas dan membuat ikhtisar serta laporan atas transaksi yang dilaksanakan oleh suatu entitas. Proses akuntansi antara lain menganalisis bukti transaksi, kemudian menjurnal dalam buku jurnal, posting ke buku besar dan buku besar pembantu serta menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan yang harus disusun sebagai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah antara lain laporan pelaksanaan realisasi anggaran dan laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran antara lain laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL. Sedangkan laporan keuangan meliputi laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Laporan Arus Kas serta catatan atas laporan keuangan (CALK). Setelah itu seluruh laporan keuangan akan diperiksa oleh Auditor eksternal yang independen.

Auditor eksternal independen pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). BPK akan melaksanakan pemeriksaan keuangan pada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Laporan keuangan akhir tahun akan diperiksa dengan jenis audit yaitu audit keuangan. Penyusunan laporan keuangan memiliki hubungan yang positif terhadap pemerintahan yang efektif. Hal sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa antara keterbukaan informasi publik (laporan keuangan) dan keterlibatan masyarakat memiliki hubungan Pertama, penelitian telah memberikan bukti hubungan positif antara keterbukaan informasi publik dan pemerintah yang efektif (Gregory A. Porumbescu, 2019).

d. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahapan pengelolaan keuangan pada tahap akhir. Tahap ini berisi kegiatan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Audit dilaksanakan oleh auditor independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Sebelum laporan keuangan diaudit pemerintah daerah akan diperiksa terlebih dahulu oleh internal auditor. Internal auditor pemerintah daerah adalah inspektora provinsi, kabupaten dan Kota. Untuk pemerintah laporan keuangan akan diperiksa terlebih dahulu oleh inspektorat kementerian. Pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat disebut sebagai review laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, taat pada pertun perundangan dan menerpakan standad pengendalian internal.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal dilakukan oleh BPK RI dengan tujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah/pemerintah daerah. Opini yang diberikan oleh BPK RI terdiri dari opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar dan

Tidak Memberi Pendapat. Laporan keuangan yang telah diaudit akan didistribusikan kepada para pemangku kepentingan termasuk DPR/D guna melakukan fungsi pengawasan. Didalam laporan hasil pemeriksaan terdapat temuan-temuan selama pemeriksaan. Temuan-temuan ini melengkapi perspektif struktural yang ada tentang efektivitas pemerintahan terbuka (Dermont.P, 2010) oleh menawarkan wawasan tentang cara menyampaikan informasi pemerintah dengan cara itu beresonansi dan melibatkan khalayak yang dituju.

Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang peneliti lakukan antara lain dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Chindengwike, J. D. (2023). Dalam Effectiveness of Financial Planning on Public Sectors Performance in Tanzania . *Journal of Global Economy*, menggunakan variabel Variabel yang digunakan antara lain:Public sector,Performance,Financial,planning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat hubungan positif secara statistik antara keuangan perencanaan dan kinerja sektor publik. Ashis Adhikary (2023) dalam Millennium Challenge Corporation: Interpretations and Implications for the National Security of Nepal, menggunakan variabel Variabel yang digunakan dalam artikel antara lain Kedaulatan, Geopolitik, Tata Kelola. Hasilnya menyatkan bahwa Studi mengenai penafsiran Millennium Challenge Corporation (MCC) di Nepal menyimpulkan bahwa perbedaan penafsiran MCC berdasarkan tema kedaulatan, geopolitik, dan pemerintahan menimbulkan tantangan terhadap keamanan nasional Nepal.

Momi Dahan (2019) dalam artikel Budget institutions and government effectiveness. Menggunakan variabel World Bank (WB) government effectiveness Budget centralization (BC), BC at the formulation stage, BC at the legislation stage BC at the execution stage. Hasilnya menyatakan bahwa dengan menggunakan indikator efektivitas pemerintah, penelitian ini mengungkapkan anggaran sentralisasi berperan dalam menjelaskan variasi efektivitas pemerintah negara-negara OECD. Gregory A. Porumbescu, Maria Cucciniello, J. Ramon Gil-Garcia (2019) dalam artikel Accounting for citizens when explaining open government effectiveness menggunakan variabel Variabel yang digunakan adalah keterbukaan informasi publik dan keterlibatan masyarakat, serta efektivitas pemerintahan terbuka. Hasilnya memberikan bukti hubungan positif antara keterbukaan informasi publik dan partisipasi publik pada pemerintahan yang terbuka. Xolile Mkuhlana, Dr. Larry Enoch Jowah (2022) dalam artikel The Role Of Budgeting Systems On Successful Project Execution At A Selected Government Department In The Cape Metropolis dengan menggunakan variabel Variabel yang digunakan adalah proses anggaran, problem anggaran, pelaksanaan anggaran, perencanaan strategik, pengesahan (legislasi). Hasilnya menunjukkan perlunya pelatihan intensif dan pemberdayana pemegang anggaran untuk memastikan bahwa anggaran, penganggaran proses, implementasi proyek, dan layanan yang diantisipasi pengiriman ke masyarakat berjalan dengan baik Douglas Addison 2013 dalam artikel The Quality of Budget Execution and Its Correlates ,dengan menggunakan variabel, Variables dependet: Aggregate Revenue Deviation, Aggregate Expenditure eviation,, Compositional Expenditure Deviatio, Variables Exogen, Revenue Policy,Revenue Volatilit, Debt Service Burden. Hasilnya sangat sedikit negara yang mampu melaksanakan anggarannya dengan baik, apa pun kondisinya apakah mereka memprioritaskan stabilitas makroekonomi atau penyediaan layanan publik

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara. Cara pengumpulan tersebut antara lain dengan mengajukan akses data pada Pemerintah Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan atau Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan pada tiap Provinsi. Selain itu pengumpulan data juga dengan mengakses *official web* dari masing-masing pihak yang terkait antara lain website resmi Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia maupun Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten atau Kota. Data yang kami minta pada para pihak dikirim para pihak dalam bentuk fisik maupun softcopy sedangkan data yang kami akses melalui official web dapat kami download dari official web masing-masing pihak. Dari data yang ada kami lakukan rekapitulasi dan kompilasi serta perhitungan sesuai kebutuhan masing-masing variabel penelitian.

Jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data dengan jenis sekunder. Data yang kami kumpulkan berasal dari data laporan keuangan yang diterbitkan Pemerintah Daerah. Data Laporan keuangan pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus kas dan Neraca. Selain itu kami juga menggunakan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia. Laporan hasil pemeriksaan berupa ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). Ikhtisar hasil pemeriksaan terdiri dari semester I dan semester 2 pada tiap periode tahun anggaran. Selain itu kami juga akan mengumpulkan dan merekap data indikator kinerja Pemerintah Daerah dari badan pusat statistik baik Provinsi maupun BPS pusat.

Populasi dan Sampel

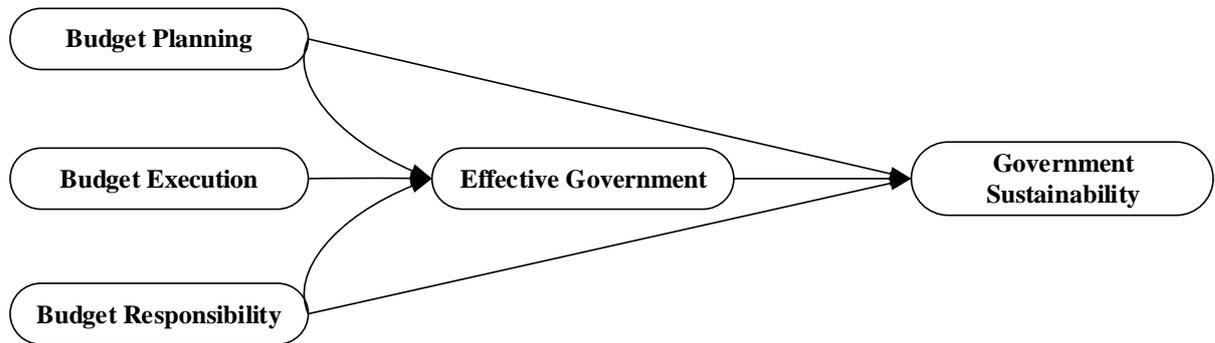
Pemerintah Daerah yang menjadi obyek penelitian kami adalah pemerintah daerah di Indonesia yang meliputi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.. Pengujian akan menggunakan populasi pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Pemerintah Provinsi di Indonesia sampai dengan tahun 2023 terdiri dari 38 provinsi. Pemerintah Kabupaten di Indonesia terdiri dari 416 pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota berjumlah 98 pemerintah kota. Penelitian ini akan menggunakan sample jenuh

Data penelitian ini berupa laporan keuangan berupa Pemerintah Daerah. Data yang diuji meliputi laporan keuangan tahun 2018 2019, 2020, 2021 dan 2022. Laporan keuangan yang diuji antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) neraca, laporan arus kas (LAK) dan laporan operasional (LO) serta laporan arus kas dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Wilayah Sumatera Selatan. Selain itu juga data kinerja pada Pemerintah Daerah.

Model Penelitian

Penelitian yang kami lakukan menggunakan kerangka penelitian berupa pengujian pengaruh atas variabel X (independen) terhadap variabel Y (dependen). Variabel independen yang dimaksud adalah maturasi Sistem pengendalian internal pemerintah, efisiensi belanja daerah. Sementara variabel dependen adalah kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah. Masing-masing variabel memiliki proksi atau indikator sebagai alat ukur yang akan diteliti pada penelitian yang akan kami laksanakan. Untuk memudahkan memahami penelitian kami maka

kami coba menyusun desain atau model penelitian. Dari uraian pada bagian diatas, kami menyusun model penelitian sesuai dengan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar1. Model Penelitian

Road Map Penelitian

Peneliti tertarik meneliti tema sektor publik yang menjadi core kompetensi bagi peneliti. Pada tahun 2002 hingga saat ini peneliti selalu meneliti tema-tema pada akuntansi sektor publik. Peneliti telah meneliti tema terkait anggaran pendapatan, sistem akuntansi dan sistem pengendalian pada pemerintah daerah.

Pada kesempatan kali ini peneliti ingin meneliti terkait dengan sistem pengendalian internal (SPI) pemerintah daerah. SPI sangat berguna bagi pemerintah untuk mengendalikan seluruh efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah. Untuk itu penting melakukan pendalaman faktor-faktor lain yang berpengaruh atau kaitannya dengan SPI.

Penelitian ini merupakan rangkaian penelitian yang diummai dari tahun 2020 yang meneliti terkait kinerja layanan publik. Dilanjutkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terkait dengan tema maturitas sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2023 dua variabel tersebut dikaitkan dengan efektivitas dan efisiensi belanja pada pemerintah atau pemerintah daerah.

Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Efektivitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan urusannya harus menyusun perencanaan yang baik dan matang. Hal ini penting karena fungsi perencanaan program dan kegiatan menjadi hal utama bagi ketepatan pembangunan dan kelancaran pembangunan. Pemerintah daerah telah memiliki payung hukum yang mengatur sistem dan prosedur perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan daerah antara lain RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dokumen ini menjadi dokumen yang menjadi dasar pada tahap penyusunan anggaran pada tahap berikutnya. Dokumen perencanaan yang baik akan mempengaruhi efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat yaitu dengan tersedianya berbagai program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kami menduga hipotesis pertama kami adalah:

H1: Sistem perencanaan anggaran pemerintah berpengaruh pada efektivitas pelayanan pemerintah Daerah.

Pengaruh Penyusunan Anggaran Terhadap Efektivitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Tahap penyusunan anggaran merupakan tahapan untuk menuangkan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dari tiap program kerja dari setiap organisasi perangkat daerah. Penyusunan anggaran dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas keuangan atau fiskal pemerintah daerah. Dengan mengetahui kapasitas fiskal pemerintah daerah dapat menyusun berbagai program kerja yang dibutuhkan bagi kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kapasitas keuangan suatu daerah maka akan semakin besar ruang bagi pemerintah daerah dalam menyusun program kegiatan. Program kerja yang kuat dan berorientasi pada layanan pada masyarakat akan memberikan fondasi yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewenangan dan urusan baik wajib maupun pilihan pada masyarakat umum. Dengan kemampuan fiskal yang besar maka ruang kebijakan semakin lebar dan semakin mampu memberikan layanan kepada publik. Dengan demikian situasi demikian akan memberikan kemampuan yang besar bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang pada akhirnya akan memberikan efektivitas layanan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan publik. Kami menduga dalam hipotesis kedua menjadi:

H2: Sistem penyusunan anggaran pemerintah berpengaruh pada efektivitas pelayanan pemerintah Daerah.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Efektivitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan dimana pemerintah daerah dengan segenap OPDnya melaksanakan program kerja. Pelaksanaan kerja dari sisi pendapatan yaitu dengan memungut pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya serta pembiayaan penerimaan daerah. Sedangkan dari sisi pengeluaran yaitu penyerapan belanja dan pembiayaan pengeluaran. Penerimaan pendapatan yang tercantum di anggaran dan pendapatan belanja daerah merupakan batas minimal yang harus dicapai. Sedangkan belanja menjadi batas atas pengeluaran yang dapat dilakukan. Secara kesisteman hubungan antara input proses dan output dalam kaitannya pengelolaan sumberdaya akan menunjukkan hubungan efisiensi pengelolaan sumberdaya. Sumberdaya Pemerintah Daerah salah satunya adalah anggaran. Anggaran terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk mendanai program kegiatan pemerintah merinci inputnya ke dalam rumusan anggaran belanja. Pengelolaan anggaran belanja yang efisien akan menghasilkan pelayanan publik yang sehat dan baik. Kami menduga dalam hipotesis kedua menjadi:

H3: Sistem Pelaksanaan anggaran pemerintah berpengaruh pada efektivitas pelayanan pemerintah Daerah.

Pengaruh Pelaporan Realisasi Anggaran Terhadap Efektivitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Realisasi anggaran menggunakan mekanisme atau sistem dan prosedur yang telah dituangkan dalam peraturan menteri dalam negeri. Sistem dan prosedur pelaporan merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi yang telah terjadi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan program kerja. Program kerja dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah daerah dengan proses pengajuan belanja dan penarikan pajak dan retribusi daerah. Hasil penerimaan pendapatan daerah dicatat dengan sistem pencatatan penerimaan daerah. Sedangkan belanja daerah dicatat dengan sistem pengeluaran

daerah. Selain itu juga terdapat sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sistem pelaporan dengan menggunakan akuntansi menggunakan prinsip periodisasi tahun pembukuan. Periodisasi berlangsung dari Januari hingga Desember. Sehingga terdapat cut off periode dalam proses pelaporan realisasi anggaran. Pemerintah daerah dituntut harus taat pada asas atau prinsip periodisasi. Karena jika laporannya mundur maka akan mempengaruhi proses berikutnya yaitu audit. Dalam rangkaian pengelolaan keuangan berikutnya akan mempengaruhi proses perhitungan SILPA bagi perencanaan program kerja tahun berikutnya. Sehingga proses pelaporan yang taat asas akan mendukung tatakelola pemerintah yang baik. Kami menduga dalam hipotesis keempat menjadi:

H4: Sistem Pelaporan realisasi anggaran pemerintah berpengaruh pada efektivitas pelayanan pemerintah Daerah.

Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Efektivitas Pelayanan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh badan atau lembaga yang independen. BPK merupakan lembaga pemeriksa eksternal dan independen bagi laporan keuangan pemerintah daerah. BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang independen. Opini yang dihasilkan dapat menjadi *assurance* bagi realisasi pelaksanaan anggaran didalam laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai realisasi anggaran akan bersifat normatif dalam pengertian mencerminkan nilai saldo angka akuntansi yang normal. Nilai angka realisasi anggaran mencerminkan kinerja dari organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja sesuai kewenangan dan urusannya masing-masing. Pelaksanaan anggaran dicatat dengan metode akuntansi. Pencatatan dengan metode akuntansi menghasilkan berbagai laporan keuangan. Laporan Keuangan diaudit oleh BPK dan Menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan memuat opini BPK dalam memeriksa laporan tersebut. Semakin baik opini yang diterima oleh pemerintah daerah dari hasil pemeriksaan menunjukkan ketaatan pemerintah daerah dalam pencatatan realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan tata kelola pemerintah daerah yang efektif. Dengan penjelasan diatas maka kami merumuskan Hipotesis ke 5 sebagai berikut:

H5: Sistem Pelaporan realisasi anggaran pemerintah berpengaruh pada efektivitas pelayanan pemerintah Daerah.

Dampak Efektivitas Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pembahasan pada tingkat lanjut mengemukakan bahwa faktor-faktor terkait pemerintah efektif meningkatkan beberapa bentuk motivasi masyarakat dalam instansi, motivasi tugas, motivasi misi, dan motivasi pelayanan publik yang dapat dibedakan tetapi harus dihubungkan bersama dalam instansi pemerintah yang efektif. Akibat wajar dari fakta ini adalah kepaluan klaim yang sama-sama umum: bahwa organisasi publik dan nirlaba tidak dapat, dan rata-rata tidak, beroperasi seefisien bisnis swasta (Simon, 1998). Satu pengecualian adalah Dahan dan Strawczynski (2013), yang menunjukkan hal tersebut sementara peraturan anggaran efektif dalam mengendalikan defisit pemerintah dan pengeluaran OECD negara, hal ini dapat merusak efektivitas pemerintah dalam mengurangi kesenjangan dan kemiskinan karena pengaruhnya terhadap komposisi pengeluaran publik yang mendukung upah

pemerintah dan menentang transfer pemerintah kepada masyarakat miskin (Dahan, 2019). Hal ini terutama berlaku bagi negara-negara yang tidak melakukan hal tersebut. Dengan penjelasan diatas maka kami merumuskan Hipotesis ke enam sebagai berikut:

H6: Sistem Pelaporan realisasi anggaran pemerintah berpengaruh pada efektivitas pelayanan pemerintah Daerah.

Operasional Variabel

Pemerintah Yang Efektif

Pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang mampu melaksanakan berbagai layanan publik atau masyarakat dengan baik. Banyak teori dan wacana mengenai birokrasi publik (pemerintah) memperlakukan birokrasi secara negatif, seperti jika mereka pasti cenderung menuju kinerja yang lemah. Orientasi ini tetap berlaku meskipun cukup besar bukti bahwa banyak organisasi pemerintah mempunyai kinerja yang sangat baik, meskipun banyak contoh kinerja mereka yang sangat baik. Penelitian ini mengacu pada literatur dan penelitian tentang organisasi pemerintah yang efektif untuk memilih dan mengembangkan elemen konseptual suatu teori untuk menjelaskan efektivitasnya. Yang tersedia penelitian menunjukkan bahwa teori semacam itu harus mencakup hal-hal komponen berikut antara lain perilaku suportif dari pemangku kepentingan eksternal seperti otoritas politik; otonomi lembaga dalam menyempurnakan dan melaksanakan misinya; "valensi misi" yang tinggi (misi yang menarik); budaya yang kuat dan berorientasi pada misi; dan perilaku kepemimpinan tertentu. Untuk melaksanakan pemerintah yang efektif memerlukan institusi yang sehat dan kuat. Institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal. Ukuran intitusi atau pemerintah yang efektif diwakili dengan ukuran pilar 1 dari indke daya saing pemerintah (BRIN, 2023).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesjahteraan masyarakat merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan indikasi tingkat kesejahteraan masyarakat yang diwakili dengan indikator .perekonomian yang stabil, .pembangunan yang berkelanjutan, .kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pilar stabilitas ekonomi makro memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah yang dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro yang stabil merupakan kunci kepercayaan investor dan memudahkan pelaku ekonomi dalam menjalankan usaha sehingga berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Kestabilan ekonomi makro ditunjukkan dari nilai variabel antara lain tingkat Inflasi, Kapasitas fiskal daerah, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran terbuka, Indeks ketahanan pangan, Nilai investasi, dan PDRB per kapita . dari beberap variabel ini dihitung sebagai wakil dari ukuran kesejahteraan masyarkat. Nilai variabel ini akan diambil dari indeks daya saing daerah (BRIN, 2023).

Perencanaan Anggaran

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai

penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RPJMD adalah kegiatan untuk melaksanakan analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Selain pendapatan maka analisis perencanaan anggaran juga melakukan analisis terhadap belanja dan pembiayaan. Disamping itu juga melakukan Analisis Neraca Daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian penelitian ini akan menggunakan rasio dari perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas untuk menunjukkan kualitas perencanaan dari aspek keuanangan (Permendagri, 2017)

Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran merupakan tahapan untuk menyusun anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan anggaran yang memiliki dimensi waktu jangka pendek yaitu 1 (satu) tahun periode anggaran. Pada taha ini disusun anggaran dalam bentuk angk-angka dari program dan kegiata yang disusun pada tahap penyusunan perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan (Permendagri, 2017). Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh

penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.

- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.

Dari uraian diatas maka peneliti akan menggunakan rasio antara kemampuan keuangan daerah dan kemampuan kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Pelaksanaan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Analisis dilakukan dengan menyusun rasio pertumbuhan dan rasio trend masing-masing komponen (Permendagri, 2017).

Pelaporan Anggaran

Pelaporan anggaran pada entitas pemerintah daerah dilakukan dengan menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan. Laporan Keuangan terdiri dari laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (BPK, 2017).. Untuk mengukur kualitas penyusunan pelaporan anggaran dapat dikuru dengan kelengkapan laporan keuangan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Dismaping itu ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai ketaatan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan.

Pertanggungjawaban Anggaran

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah akan diaudit atau diperiksa oleh auditor dalam hal ini BPK. Auditor akan menyusun laporan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (BPK, 2017). Laporan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah dan pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi.

Untuk mengukur pertanggungjawaban peneliti menggunakan unit ukur berupa opini BPK atas laporan hasil pemeriksaan. Pada variabel pertanggungjawaban anggaran ini digunakan ukuran berupa berbagai opini hasil pemeriksaan laporan keuangan dengan 4 tingkatan.

Tingkatan Opini terdapat 4 yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan opini tidak memberi pendapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji pengaruh antara variabel independen penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran dan dengan variabel dependen tatakelola pemerinth yang efektif serta dampaknya pada keberlnjutan pemerintah, dengan menggunakan rumusan regresi. Untuk itu data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan regresi. Regresi yang digunakan adalah regresi berganda karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Tahap pengujian berjenjang dua tahap yaitu pengujian variabel x1, x2 dan x3 terhadap Y kemudian dilanjutkan pengujian tahap kedua yait pengujian hubungan antara x1 dan x2 serta y terhadap z Penulis menggunakan alat bantu analisis berupa SPSS versi 20. Berikut hasil pengolahan data dan pembahasannya. Agar lebih mudah dalam memahami hasil di atas maka pada bagian interpretasi hasil ini saya membaginya menjadi dua tahapan interpretasi yakni 1. tahap menghitung koefisien jalur, 2. tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan.

Menghitung koefisien jalur

Pada tahap ini penulis menyajikan hasil perhitungan koefisien jalur model 1 dan koefisien jalur model 2 Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 3. Koefisien model jalur 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,486	,684		3,635	,000
X1	-1,504	,660	-,538	-2,280	,023
X2	,212	,163	,306	1,295	,196
X3	,417	,122	,143	3,413	,001

a. Dependent Variable: Y

Mengacu pada output regresi model 1 pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 = 0,023 dan variabel X3 = 0,01 lebih kecil dari 0,005. hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel x1 dan x2 berpengaruh signifikan terhadap y. Sedanga vaiabel X2 = 0,196 . 0,05 yang berarti variabel X2 tidak berpengaruh pada Y.

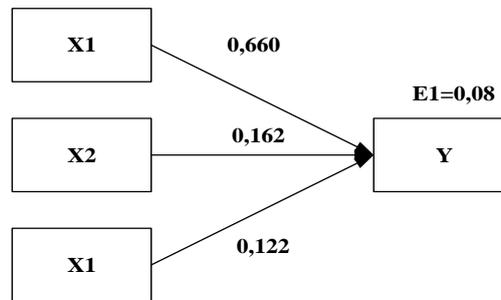
Tabel 4. Uji Determinasi Model Jalur 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,303 ^a	,092	,087	,920

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Besarnya nilai R 0,303 atau sebesar 30,3% atau R Square sebesar 0,92 atau 9,20% atau adjusted R square 0,87 atau 8,7% yang terdapat pada tabel model summary diatas. Hal ini

menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1,X2, dan X3 terhadap y adalah sebesar 30,3% (R), atau 9,2% menurut R square dan 8,7% menurut Ajusted R square. Sementara sisanya 69,7% (menurut R), 90,8% (menurut R square) dan 91,3 % (menurut Adjusted R Square) merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian ini. Sementara Itu untuk Error 1 dapat dicari dengan rumus $E1 = V 1 - 0,920 = 0,08$ dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Model Struktur 1

Koefisien Jalur Model 2

Tabel 5. Koefisien model jalur 2

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,014	,047		21,374	,000
X1	,002	,045	,013	,051	,960
X2	,000	,011	-,010	-,042	,966
X3	-,012	,008	-,065	-1,466	,143
Y	-,005	,003	-,069	-1,544	,123

a. Dependent Variable: Z

Berdasarkan output regresi diatas , model 2 pada bagian tabel koefisiensi, diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 = 0,960, X2 = 0,966, X3 = 0,143 dan y = 0,123 lebih besar dari 0,05. hasil ini memberi kesimpulan bahwa model 2 yakni variabel X1, X2, X3 dan Y tidak berpengaruh terhadap Z.

Tabel 6. Uji Determinasi Model Jalur 2

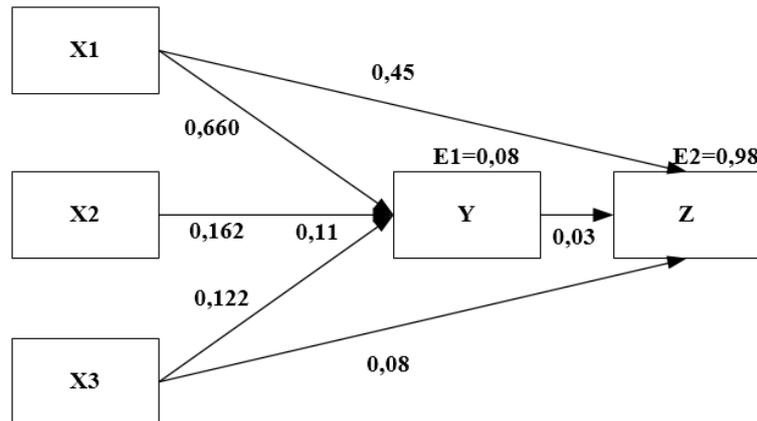
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,104 ^a	,011	,004	,06307

a. Predictors: (Constant), Y, X3, X2, X1

Besarnya nilai R2 atau R Square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,004 hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1 X2, X3 dan Y terhadap Z adalah sebesar 4% sementara sisanya 96% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti

Sementara untuk nilai $E2 = 1 - 0,11 = 0,89$. dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut:



Gambar 3. Diagram Model Struktur 2

Tahap Uji Hipotesis dan Pembuatan Kesimpulan

1. Analisis pengaruh X1 terhadap y
Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar $0,23 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap y
2. Analisis pengaruh X2 terhadap y
Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar $0,196 > 0,05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung Tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap y
3. Analisis pengaruh X3 terhadap Y
dari analisis diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar $0,01$ kurang dari $0,05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikansi X1 terhadap Z.
4. Analisis pengaruh X1 terhadap Z
Dari analisis diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar $0,960 > 0,05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung Tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z.
5. Analisis pengaruh X1 terhadap Z
Dari analisis diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar $0,966 > 0,05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung Tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z.
6. Analisis pengaruh X3 terhadap Z
Dari analisis diperoleh nilai signifikansi X3 sebesar $0,143 > 0,05$. sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung Tidak terdapat pengaruh signifikan X3 terhadap Z.
7. Analisis Pengaruh Y terhadap Z
Dari analisis diperoleh bahwa nilai signifikansi Y sebesar $0,123 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung bahwa Y terhadap Z tidak terdapat pengaruh signifikansi.
8. Analisis Pengaruh X1 melalui y terhadap Z:
Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar $0,45$. sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui y terhadap Z adalah Perkalian antara nilai beta X1 terhadap y dengan nilai Beta y terhadap z $= 0,668 \times 0,03 = 0,02$. maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu: $0,45 + 0,02 = 0,47$.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,45 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,02 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung ini menunjukkan bahwa secara langsung X1 mempunyai pengaruh terhadap Z

9. Analisis Pengaruh X2 melalui y terhadap Z

Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,111. sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui y terhadap Z adalah Perkalian antara nilai beta X2 terhadap y dengan nilai beta y terhadap Z yaitu $0,162 \times 0,03 = 0,0048$ maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0,111 + 0,0048 = 0,1158$. berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,111 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,0048 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsung. hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X2 mempunyai pengaruh terhadap Z

10. Analisis Pengaruh X3 melalui y terhadap Z

Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X3 terhadap Z sebesar 0,08. sedangkan pengaruh tidak langsung X3 melalui y terhadap Z adalah Perkalian antara nilai beta X2 terhadap y dengan nilai beta y terhadap Z yaitu $0,122 \times 0,03 = 0,0036$. maka pengaruh total yang diberikan X3 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0,08 + 0,0036 = 0,084$. berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,08 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,0036 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsung. hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X3 mempunyai pengaruh terhadap Z

Dari rangkaian pembahasan atas hasil di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh penyusunan anggaran (X1), Pelaksanaan anggaran (X2) dan pertanggungjawaban anggaran (X3), terhadap tatakelola pemerintah yang efektif (Y) serta dampaknya terhadap pemerintah Yang berketidapan (Z) tidak dapat diterima

REFERENSI

- Addison, D. (2013). The Quality of Budget Execution and Its Correlates. *World Bank*.
- Adhikary, A. (2023). Millennium Challenge Corporation: Interpretations and Implications for the National Security of Nepal. *Unity Journal, Vol. III, 40-50, 2022*.
- Alexandre Marinho, F. G. (2013). Assessing The Efficiency And The Effectiveness Of Public Expenditures On Security In Brazilian States. *DEA2013-Proceeding, 45-50*.
- BPK. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK.
- BPKP. (2019). *Laporan Kinerja Tahunan 2018*. Palembang: BPKP.
- Bryson, J. M., & Bloomberg, B. C. (2014). Public Value Governance: Moving beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. *Public administration review*.
- Chindengwike, & Daniel, J. (March 2023). Effectiveness of Financial Planning on Public Sectors Performance in Tanzania. *Journal of Global Economy Volume 19 No 1,.*

- Chindengwike, J. D. (2023). Effectiveness of Financial Planning on Public Sectors Performance in Tanzania . *Journal of Global Economy*, , -.
- Cooper, W. W., M.Seiford, L., & Tone, K. (2006). *Intriduction to Data Envelopment Analisis and Its Uses*. New York -USA: Springer.
- Dahan, M. (2019). Budget institutions and government effectiveness. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, Emerald Publishing Limited*, 217-246.
- Daulay, m. Y. (2005). Pengukuran Efisiensi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Suatu Aplikasi Data Envelopment Analisis. Yogyakarta: UGM.
- Dermont.P, M. (2010). Building Open Government. *Government Quarterly Journal*, 401-413.
- Giuberti, A. C. (2015). Budget institutions and fiscal performance of the brazilian federal government. *EconomiA*, 176 -193.
- Gregory A. Porumbescu, M. C.-G. (2019). Accounting for citizens when explaining open government effectiveness. *Government Information Quarterly*.
- Heyer, G. d. (2011). New public management: A strategy for democratic police reform in transitioning and developing countries. *Policing an International Journal of Police Strategies and Management*,, 419-433.
- Hidayah, S. N. (2019). Efisiensi Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Tahun 2016-2017 (Studi Kasus : Pemerintah Provinsi Banten). Jakarta: UIN.
- Kaufmann, D. K. (2007). Growth and governance: a reply. *The Journal of Politics Vol. 69 No. 2*,, 555-562.
- LAN. (2003). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN.
- LUC. (2024, Februari Senin). *cncindonesia.com*. Diambil kembali dari *cncindonesia.com*: <https://www.cncindonesia.com/news/20221221122948-4-398814/5-negara-ini-ekonominya-kacau-balau-2-sudah-bangkrut>
- Maryasih, L., Muti, E., & Rahmwyaty. (2016). Pengukuran Efisiensi Pengalihan Pbb Sebagai Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Dengan. *Research Gate*.
- Moynihan, D. (2008). The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform. *Georgetown University Press, Washington, DC*, -.
- Mustaqim, A. H. (2024, februari senin). *sindonews . com*. Diambil kembali dari SINDOnews.com : <https://international.sindonews.com/read/1210341/45/6-negara-yang-pernah-terancam-bangkrut-dipicu-krisis-utang-hingga-pengangguran-1695683358>
- Permendagri. (2018). Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu. -.
- Porumbescu, G. A., Cucciniello, M., & Gil-Garcia, J. R. (2019). Accounting for citizens when explaining open government effectiveness. *Government Information Quarterly*, -.

- Radnor, Z. a. (2004). Performance management in the public sector: fact or fiction? *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 53 No. 3, , 245-260.
- Ramanathan, R. (2003). *An Introduction to Data Envelopment Analysis A Tool for Performance Measurement*. new Delhi: SAGE.
- Ray, S. C. (2004). *Data Envelopment Analysis Theory and Techniques for Economics and Operations Research*. New York: Cambridge.
- RB, K. P. (2008). *Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama* . Jakarta: Kementerian Pan RB.
- Tebo. (2008). *Lampiran V: Pedoman Teknis Penilaian Tngkat Maturitas SPIP*. Tebo: Kabupaten Tebo.
- Van Dooren, W. B. (2015). *Performance Management in the Public Sector*. *Routledge, New York, NY*,, 6.
- Williams, D. (2003). Measuring government in the early twentieth century. *Public Administration Review*, , 643-659.
- Xolile Mkuhlana, D. L. (2022). The Role Of Budgeting Systems On Successful Project Execution At A Selected Government Department In The Cape Metropolis . *European Project Management Journal, Volume 12, Issue* .